

**DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Study pada Pemekaran Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)  
Dalam ilmu ekonomi dan bisnis islam

**Oleh**

**Lilya Novita  
Npm : 1551010219**

**Prodi : Ekonomi Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Desa Sedampah Indah merupakan salah satu desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan merupakan desa hasil pemekaran dari desa Padang Cahya tahun 2007 dengan Luas wilayah desa Sedampah Indah 1.900,76 Ha. Profesi utama masyarakat adalah usaha tani kopi, cengkeh, dan sayur-sayuran. Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Sedampah Indah? Bagaimana dampak perkembangan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Sedampah Indah? Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Persepektif Ekonomi Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Sedampah Indah. Untuk mengetahui dampak perkembangan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Sedampah Indah. Untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat persepektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 responden yaitu masyarakat desa Sedampah Indah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan di lapangan terkait dengan dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Sedampah Indah adalah berdampak pada infrastruktur desa Sedampah Indah dengan adanya perkembangan sejumlah masjid, mushollah, perawatan Lapangan olah raga Sepak Bola, di bangunnya Polindes, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan pagar tempat pemakaman umum, penyambungan jaringan listrik, pembangunan talut, gorong-gorong, Pembangunan jembatan dan Perawatan SD dan MTS. Berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya kesejahteraan pendapatan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan keamanan. berdampak pada kesejahteraan dalam persepektif ekonomi islam dalam segi Al-Hajiyat, At-Tahsinayat, Dan Al-Dharuriyyat.

Kata Kunci : Pemekaran Desa, Pembangunan Infrastruktur, Kesejahteraan





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat Jl. LetH. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada  
Pemekaran Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : Lilya Novita  
NPM : 1551010219  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**  
**NIP. 197605292008012010**

  
**Ulul Azmi Mustofa, S.E.I.M.S.I**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan**

  
**Madnasir, S.E., M.Si**  
**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat Jl. Let H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Pemekaran Desa Sedampah Indahkecamatan Balik Bukit Kabupaten

Lampung Barat) disusun oleh: **LILYA NOVITA, NPM : 1551010219, Jurusan :**

**Ekonomi Syariah, telah diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan**

**Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at 07 Februari**

**2020.**

**TIM MUNAQSAH**

Ketua : **Dr. H. Ahmad Isnaini, M. Ag.**

Penguji I : **A. Zuliansyah, M.S.I.**

Penguji II : **Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**

Sekretaris : **Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



**Dr. Ridwan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si**

**198008012003121001**



## MOTTO

**”Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib  
Sesuatuk kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada  
Pada diri mereka sendiri”  
(Ar-ra’d, 11)**



## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

**Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini  
untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:**

**“Ayahanda dan Ibunda tercinta”**

Ayah Ihsan dan Ibunda Roslaini terima kasih telah mempersembahkan arti kehidupan melalui jerih payah, peluh keringat, rintihan, nasehat dalam proses hidup yang cukup panjang, serta selalu memberikan curatan kasih sayang, dukungan, dan doa serta restu yang tiada hentinya hingga sekarang dan sampai nanti.

**“Keluarga Besar”**

Edi Yanto, Erni Yani dan suami Nazori, Yulis Narita dan suami Andri Wahyudi Terima kasih atas curahan kasih sayang dan bantuan yang telah kalian berikan. Seluruh **keluarga besarku** dan sahabat terbaik Piska Pebrian, Nova, Dora, Hani, yang selalu memberi warna dan pelajaran padaku, dari yang mengajarkanku arti hidup sampai membantu dalam proses penyusunan karya yang sederhana ini. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ekonomi Islam B, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT`

**“ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG”**

**“Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman “**

## RIWAYAT HIDUP

Lilya Novita, dilahirkan di Padang Cahya pada tanggal 14 Juli 1995, anak dari pasangan Bapak Ihsan dan Ibu Roslaini. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Padang Cahya pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Liwa dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Negeri Liwa dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis tidak melanjutkan pendidikan namun selama 6 bulan penulis bekerja di CP. CKJ (Concep Kiara Jaya) yang berada di desa Padang Cahya Lampung Barat. Selanjutnya di tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas Islam Negeri Lampung (UM-PTKIN). Penulis sangat meyakini bahwa pengembangan diri sebagai manusia harus dicari dan dikembangkan sehingga menjadi sebuah pengalaman dalam hidup kita dimasa depan. Penulis, banyak mendapatkan hal-hal yang baru serta bermanfaat dalam menjalani proses sebagai seorang mahasiswa. Pada tahun 2018, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Waringin Sari Barat Sukoharjo Pringsewu Provinsi Lampung dan di tahun yang sama mengikuti fieldtrip ke Jakarta-Bali-Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Islam dan Ikhsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga skripsi dengan judul **“Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesefektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”** dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Hj. Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I.,M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.



4. Segenap Bapak/Ibu dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan materi-materi selama ini, guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staff akademika dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
6. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.
7. Segenap Aparatur Desa serta Masyarakat Desa Sedampah Indah yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan informasi-informasi sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 14 Januari 2020

**Lilya Novita**

**NPM. 1551010219**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Batasan Masalah .....	11
E. Rumusan Masalah .....	13
F. Tujuan Penelitian .....	14
G. Kegunaan Penelitian.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Kerangka Berfikir.....	21

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Teori .....	24
1. Desa.....	24
a. Pengertian Desa.....	24
b. Desa Menurut ParaAhli .....	25
c. Landasan Hukum Desa.....	26
d. Jenis-Jenis Desa .....	26
e. Karakteristik Desa .....	27
2. Pemekaran Desa.....	28
a. Pengertian Pemekaran Desa.....	28
b. Landasan Hukum Pemekaran Desa.....	29
c. Tujuan Pemekaran Desa .....	30
3. Pembangunan Infrastruktur .....	35
a. Pengertian Infrastruktur.....	35
b. Infrastruktur Menurut Para Ahli .....	39
c. Landasan Hukum Pembangunan Infrastruktur .....	39
d. Karakteristik Infrastruktur .....	40
4. Kesejahteraan .....	40
a. Pengertian Kesejahteraan.....	40



b. Kesejahteraan Menurut Para Ahli .....	41
c. Landasan Hukum Kesejahteraan.....	42
d. Indikator Kesejahteraan.....	43
5. Kesejahteraan Dalam Persepektif Islam .....	46
a. Kesejahteraan Dalam Persepektif Al-Qur'an dan Hadist .....	46
b. Kesejahteraan Menurut Para Ahli .....	46
c. Indikator kesejahteraan dalam ekonomi islam.....	53
B. Tinjauan Pustaka .....	55

### **BAB III DESKRISI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa .....	57
1. Sejarah Desa Sedampah Indah .....	57
2. Visi Dan Misi Desa Sedampah Indah .....	59
3. Pemerintahan Desa Sedampah Indah.....	60
4. Strategi Pembangunan Desa .....	62
5. Kondisi Geografis Desa Sedampah Indah.....	64
6. Kondisi Masyarakat Desa Sedampah Indah.....	67
7. Sosial budaya.....	71
8. Kronologi Pemekaran .....	76
B. Deskripsi Data Penelitian .....	77
1. Infrastruktur Desa Sedampah Indah .....	77
2. Dampak Pemekaran Desa Dalam Infrastruktur bagi Masyarakat Desa Sedampah Indah.....	80
3. Upaya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Yang Sudah berjalan .....	82
4. Pendapatan Desa Sebelum Dan Sesudah Pemekaran .....	87

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	90
B. Dampak perkembangan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. ....	93
C. Dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur desa p dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Persepektif Ekonomi Islam. ....	98

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah penduduk di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.....	19
2. Narasumber untuk wawancara.....	20
3. Perangkat desa Sedampah Indah.....	59
4. Jumlah Penduduk Desa Sedampah Indah.....	68
5. Tingkat pendidikan desa Sedampah Indah .....	69
6. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sedampah Indah .....	71
7. Kondisi Sosial Budaya Desa Sedampah Indah .....	72
8. Prasarana Dan Sarana Desa Sedampah Indah.....	75
9. Pemerintahan Umum desa Sedampah Indah .....	76
10. Prasarana Pembangunan Desa di Pekon Sedampah Indah .....	78
11. pendapatan masyarakat desa Sedampah Indah .....	87
12. Infrastruktur Desa Sedampah Indah Sebelum Dan Setelah Pemekaran.....	91
13. Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sedampah Indah Tahun 2011-2019 .....	92



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berfikir Penelitian .....	25
2. Stuktur organisasi pemerintahan desa sedampah indah .....	62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul, “DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESEFEKTIF EKONOMI ISLAM”, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut, hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang di kehendaki penulis.

Berikut ini dapat di jelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalam judul.

#### **1. Dampak**

Dampak, secara etimologis pengertian dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>1</sup>

#### **2. Pemekaran desa**

Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa.<sup>2</sup>

#### **3. Desa**

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Silvana Yosephus, Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga), *Jurnal Politico* , Vol 3, No 1, 2014.

<sup>2</sup>Haw. Widjaja, otonomi desa (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), h. 41.



#### 4. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya dan geliat yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan asas Pancasila.<sup>4</sup>

#### 5. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sistem fisik dalam menyediakan, transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik lain, seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

#### 6. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Islam (Studi Kasus Pemekaran Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) adalah bagaimana perkembangan infrastruktur di suatu daerah setelah terjadi pemekaran wilayah

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>4</sup>Nicko Santer, Implementasi Program Gerdema Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 3, No.3, 2015, h. 238.

<sup>5</sup>Ferdy Posumah, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15, No 2, 2015, h. 5.

<sup>6</sup>Amirus Sodik, "konsep kesejahteraan dalam islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 384.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul proposal tentang “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ” ini adalah :

### 1. Secara Objektif

a. Diindonesia banyak ditemukan pemekaran desa dilakukan karena mengharapkan sumbangan yang lebih besar, banyak desa dimekarkan dengan tidak memenuhi ketentuan pemekaran. Salah satunya dengan jumlah penduduk yang hanya sedikit, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak mendukung, seperti gedung pemerintahan tidak ada dan jalan penghubung antar desa tidak mendukung. keadaan demikian tidak mungkin menyelenggarakan pembangunan yang berarti. berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat sekitar dan profil desa sedampah indah melakukan pemkaran dengan tidak memenuhi syarat pemakaran yang di tetapkan dalam peraturan menteri dalamnegeri nomor 28 tahun 2006.

b. Desa Sedampah Indah berada di daerah pegunungan dan mayoritas penduduk adalah petani sehingga keberadaan infrastruktur yang memadai sangat di butuhkan di desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2. Secara Subjektif

a. Bahwa data dan literature yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia dan mudah dipahami sehingga, meyakinkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah perkembangan infrastruktur setelah pemekaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sedampah indah. Hal ini sangat sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Ekonomi Islam.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang bersifat majemuk (plural) dalam hal etnis, bahasa daerah, agama, budaya, geografi dan lain-lain.<sup>7</sup> Dengan keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintahan sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Karena mengingat negara Indonesia bukanlah sebuah negara yang kecil sehingga sangat sulit untuk pemerintahan menjangkau daerah satu persatu terutama untuk daerah-daerah terpencil. Untuk memudahkan pengaturan dan penataan pemerintahan, di perlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri, serta dekat dengan rakyat sehingga saat ini telah terjadi pemekaran-pemekaran wilayah baru menjadi provinsi maupun kabupaten/kota/desa.

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Koesoemahatmadja, R.D.H. *Peranan Administrasi dalam Pembangunan*. (Jakarta: Eresco 1979), h. 23

<sup>8</sup> H. A. Tabrani Rusyan. *Membangun efektivitas kinerja kepala desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 1



Desa menurut beberapa para ahli sosiologi pedesaan dan antropologi memberikan pandangan yang beragam tentang desa.<sup>9</sup>

1. Menurut Koentjaraningrat, desa di maknai sebagai suatu komoditas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Pemaknaan tentang desa menurut pandangan ini menekankan pada cakupan, ukuran atau luasan dari sebuah komunitas, yaitu cakupan dan ukuran atau luasan yang kecil.
2. Menurut Haymi Dan Kikuchi desa sebagai unit dasar kehidupan kelompok terkecil di asia. Dalam konteks ini “desa” di maknai sebagai suatu “desa alamiah” atau dukuh tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi.

Di indonesia terdapat bermacam bentuk desa, yang pertama adalah desa “genealogis” (generatie = keturunan). Penduduk desa ini mempunyai hubungan kekeluargaan dan berasal dari keturunan yang sama, yang kedua adalah desa “territorial” (Territorial = wilayah), warga desa di sini tidak memiliki hubungan keturunan satu sama lain. Dasar teritorial mempunyai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah yang sama di karenakan masyarakat mempunyai kepentingan yang sama.

Diketahui dari profil desa, Desa Sedampah Indah merupakan desa teritorial (teritorial = wilayah) karena warga desa sedampah indah tidak memiliki hubungan keturunan satu sama lain. Sebagian besar penduduk di desa Sedampah Indah merupakan penduduk pendatang dari luar daerah atau luar provinsi Lampung. Dengan berbagai suku dan agama yang berbeda beda, namun meski dengan adanya perbedaan masyarakat Desa Sedampah Indah

---

<sup>9</sup>Muhammad jid dan ahmad tarmiji alkhudri. *Sosiologi pedesaan* (jakarta: pt. Rajagrafindo persada, 2016), h. 3.

mampu hidup berdampingan secara damai. Sehingga desa sedampah indah mampu menjadi desa sendiri setelah memisahkan desa sedampah indah dari desa induk yaitu desa padang cahya melalui pemekaran desa.

Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa.<sup>10</sup> Pemekaran desa dapat berupa penggabungan dua atau lebih desa menjadi satu desa atau pemecahan satu desa menjadi dua atau lebih desa. Namun di Indonesia yang lebih sering terjadi adalah pemecahan dari satu desa menjadi dua atau lebih, dengan berbagai faktor pendorong untuk melakukan pemecahan, yang paling sering terjadi adalah dengan alasan ingin menjadi desa yang mandiri dan menginginkan pelayanan masyarakat yang lebih memuaskan.

Berdasarkan Permendagri No. 28 Tahun 2006 jumlah penduduk desa minimal 1.000 jiwa, apabila jumlah penduduk desa kurang dari jumlah tersebut dapat menimbulkan masalah dalam keberlangsungan perkembangan desa. Kualitas sumberdaya manusia juga sangat penting bagi sumbangsih kemajuan desa. Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola potensi desa yang ada secara efektif dan berdaya guna, apabila potensi desa dapat dikelola dengan baik maka sumberdaya manusianya dapat dikatakan baik.

Kondisi desa juga dihadapkan dengan belum meratanya faktor penyediaan prasarana pelayanan masyarakat ke seluruh bagian desa. Sarana dan prasarana kurang menjangkau tiap bagian desa. Fasilitas sarana dan prasarana hanya terdapat di pusat-pusat desa tertentu yang dekat dengan keramaian. Untuk mencari solusi dari permasalahan desa tersebut, Pekon sedampah indah melakukan pemekaran pada tahun 2008 dari Pekon padang

---

<sup>10</sup>Haw. Widjaja, otonomi desa (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), h. 41.

cahya. Pekon Padang Cahya adalah salah satu desa yang secara administrative merupakan bagian wilayah Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat .

Namun desa Sedampah Indah pada saat terjadi pemekaran jumlah kk hanya mencapai 150 kk dengan 834 jiwa, di desa sedampah indah juga tidak memiliki akses transportasi yang memadai karena letak desa yang berada di pegunungan dan pelosok dengan keadaan kendaraan susah untuk mencapai desa tersebut dan pada saat pemekaran di desa sedampah indah pula tidak memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang desa tersebut untuk melakukan pemekaran desa.

Pembangunan adalah upaya dan geliat yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan asas pancasila.<sup>11</sup> Sesuai karakteristik potensi unggulan desa yang tergambar dalam profil desa dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan di desa, seperti desa home industri, desa nelayan, desa persawahan, desa wisata desa perkebunan, desa hutan, dan sebagainya.

Dasar hukum pembangunan Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa. Pada pasal 78 berisi tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam

---

<sup>11</sup>Nicko Santer, Implementasi Program Gerdema Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 3, No.3, 2015, h. 238.



dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetapi dengan luasnya suatu desa tertentu pembangunan suatu desa tidak merata.<sup>12</sup>

Maksud pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin.<sup>13</sup> Salah satu hambatan yang penting yang menyebabkan tingkat kemakmuran penduduk pedesaan di negara berkembang rendah.

Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan, kesejahteraan adalah kecukupan kebutuhan, yang berarti mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material (makanan-minuman, pakaian, perumahan, alat-alat dsb) dan kebutuhan spiritual (pendidikan, agama, ilmu, keamanan, kepercayaan kepada diri, dsb) dengan layak.<sup>14</sup>

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Pasal 78.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 2.

Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data untuk sector informal, di Negara Indonesia pekerjaan di sector informal lebih banyak daripada pekerjaan di sector formal dan data untuk sector informal secara keseluruhan sulit ditemukan. Selain itu masyarakat merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya tentang berapa besarnya pendapatan.

Sedangkan dalam pandangan islam Sejahtera merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Quraisy (106) : 3-4 sbb :

﴿خَوْفٍ مِّنْ وَّاءٍ أَمَنَهُمْ جُوعٍ مِّنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي رَبُّهُ هَذَا رَبٌّ فَلْيَعْبُدُوا﴾

Artinya: *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan<sup>15</sup>*

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa untuk sejahtera harus mampu memenuhi kebutuhan pokok dalam ayat tersebut disebutkan “memberi makan” atau pemenuhan kebutuhan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Hal ini mengidentifikasikan bahwa umat islam harus merdeka secara ekonomi akan mempermudah manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Hadirnya rasa aman juga menjadi indikator kesejahteraan sosial berdasarkan ayat ini, hal ini membuktikan bahwa dalam membangun kesejahteraan harus ada peran dari pemerintahan yang berkewajiban dalam

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Deponegoro, 2005) Q.S : Al- Qurasy Ayat (106)3-4, h. 483.

menyelenggarakan negara dalam hal ini adalah memberikan rasa aman bagi masyarakatnya.<sup>16</sup>

Desa sedampah indah sebelum adanya pemekaran Desa merupakan salah satu bagian dari wilayah Desa Padang Cahya yang memiliki luas wilayah 1900,76 hektar terbagi dalam 5 pemangku/dusun dengan jumlah penduduk yang mencapai 834 jiwa.<sup>17</sup> Pada tahun 1980 desa Sedampah Indah bernama desa Sedampah dengan jumlah 30 KK dan telah merencanakan pemekaran pada tahun 2007 resmi menjadi desa pertimbangan untuk dimekarkan dengan jumlah 150KK. Keadaan sarana prasarana di Desa Sedampah Indah sebelum pemekaran kurang memadai. Berdasarkan kondisi prasarana jalan, dari seluruh jumlah total jalan 6.000 m yang ada di Desa Sedampah Indah berupa jalan tanah dengan kondisi rusak. Selain itu permasalahan lain juga terjadi pada saat musim penghujan tiba yang mana pada saat ini jalan menuju pasar sering terjadi banjir, ini dikarenakan saluran pembuangan air kurang lancar sehingga perlu dibangun talud agar saluran air menjadi lebih lancar, karena saluran ini juga menghubungkan menuju saluran irigasi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat prasarana jalan merupakan salah satu aspek utama untuk mempermudah transportasi untuk menghubungkan desa satu ke desa yang lain. Tidak ada gedung pendidikan, Desa Sedampah sebelum pemekaran tidak ada sarana prasarana pendidikan padahal pendidikan sangat di butuhkan untuk kemajuan suatu desa, untuk sekolah SD saja masyarakat Sedampah harus

---

<sup>16</sup>*Ibid...*

<sup>17</sup>Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP), *Dokumen rencana pembangunan jangka menengah pekon (RPJM-PEKON)* tahun 2016-2021 pekon sedampah indah kecamatan balik bukit kabupten lampung barat.



ke desa lain dan lokasi desa sangat jauh dengan menempuh jalan tanah, tempat ibadah hanya mushola 1 unit, PSAB (Prasarana Air Bersih) tidak ada sehingga masyarakat harus memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang jadi masalah bagi masyarakat adalah sebagian masyarakat berada jauh dari sungai dan ketika musim kemarau tiba air sungai pun hampir mengering. Pembangkit listrik/penerangan tidak ada.<sup>18</sup> Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat prasarana merupakan salah satu aspek utama untuk meningkatkan perekonomian, oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai. Maka pemerintah Desa Sedampah Indah berupaya untuk menemukan solusi terbaik yaitu dengan cara melakukan pemekaran desa tersebut.

Masalah-masalah yang ada di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pemekaran Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

#### **D. Batasan Masalah**

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diangkat. Dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian.<sup>19</sup> Oleh karena itu, fokus

---

<sup>18</sup>Suratal, *Wawancara Kepada Responden Kepala Desa Sekaligus Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat*, 21 April 2019.

<sup>19</sup>Santana, Septiyawan. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 46.

penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan teori dan Kerangka pikir/konsep yang terdapat pada tinjauan pustaka, tergambar dengan jelas bahwa fokus penelitian ini mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur dan dampak perkembangan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Kemudian untuk mengetahui Peningkatan sosial ekonomi masyarakat, peneliti memfokuskan pada indikator-indikator sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya Infrastruktur Desa

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran desa Sedampah Indah telah meningkatkan infrastruktur desa. Dengan kata lain, apakah pemekaran desa Sedampah Indah sudah meningkatkan atau melakukan perbaikan berbagai infrastruktur seperti; jalan utama, ganggang jalan, kantor desa, gedung-gedung untuk kepentingan desa dan lain sebagainya.

#### 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah perkembangan pembangunan infrastruktur desa sedampah indah telah meningkatkan perekonomian masyarakat hingga mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain, apakah perkembangan pembangunan infrastruktur desa Sedampah

Indah sudah mampu memperlancar kegiatan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sedampah Indah.

Berdasarkan Pemakaran di atas terlihat dengan jelas bahwa Fokus penelitian sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Namun demikian dalam penelitian kualitatif fokus penelitian tidaklah bersifat permanen melainkan dapat berubah sebab dengan adanya perubahan terhadap fokus penelitian dapat berarti bahwa penelitian yang dilakukan jauh lebih dapat dipahami dan lebih meningkat. Pada penelitian ini, fokus penelitian yang diarahkan adalah melihat Dampak Pemekaran Desa Dalam Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Dan Dampak Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana dampak perkembangan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur desa pecahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa



Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat  
perspektif ekonomi islam?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui dampak perkembangan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
3. Untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur desa pecahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada desa/pekon Sedampah Indah ini dengan harapan agar penelitian berguna untuk semua pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat lebih memahami dan dapat membandingkan teori yang ada di bangku kuliah dengan kejadian sebenarnya di lapangan.
  - b. Pembaca dapat mengetahui tentang perkembangan pembangunan infrastuktur desa dan apakah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang perkembangan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran.
- b. Bagi pemerintah sebagai masukan guna perbaikan atau sumbangan pemikiran kepada aparat desa mengenai sistem pembangunan infrastruktur desa agar lebih maju.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang di gunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>20</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan

<sup>20</sup>Suharsimi Rikunto, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Bina Aksara, 2006), h. 112.

dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan dampak pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur desa pecahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Ekonomi Islam.

Selain menggunakan penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

#### b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dari jenis penelitian kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>22</sup>

Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu

<sup>21</sup>Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142-144.

<sup>22</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 305.



pristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang di anggap refresentatif.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau, fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karenatujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat di percaya), dan obyektif (sesuai dengan kenyataan).

- a. Studi lapang (*field research*). Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah di tentukan. Teknik pengumpulan data studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut.

- 1) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung.
- 2) Wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang di narasumber (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
- 3) Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. Pada penelitian peneliti mengumpulkan data monografi desa, dan berita-berita mengenai pembangunan fisik di desa Sedampah Indah.<sup>23</sup>
- 4) Studi pustaka (*library research*), yaitu dengan membaca buku, jurnal, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 381.

kesimpulannya.<sup>24</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang ada di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, akan di perinci dalam tabel di bawah ini.

Table 1.  
Jumlah penduduk di desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat.

No	Kecamatan Balik Bukit	Jumlah Penduduk	Jumlah Luas wilayah
1.	Desa sedampah indah	1.345 jiwa 800 kk	1.900 hektar

Sumber: Buku Dokumentasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJM)

$$\frac{\text{Jumlah KK}}{10\%} = \frac{800}{10\%}$$

$$= 80 \text{ kk}$$

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut.<sup>25</sup> Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental sampling. Insidental Sampling adalah teknik penentu sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai narasumber atau responden

Tabel 2  
Narasumber Untuk Wawancara

No	Responden	jumlah
1	Penduduk desa Sedampah Indah	17 orang

<sup>24</sup>Ibid h. 80.

<sup>25</sup>Ibid. h. 2015

## 5. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian adalah suatu Konsep yang digambarkan dalam definisi konsep tentu saja tidak akan dapat diobservasi atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan jembatan yang menghubungkan conceptual-theoretical level dengan empirical –observational level.

- a. Dampak Pemekaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat setelah terjadinya pemekaran daerah dalam bidang pembangunan
- b. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana pokok yang sudah selayaknya ada dalam masyarakat:
  - 1) Ketersedian fasilitas jalan yang memadai
  - 2) Ketersediaan sarana air bersih dari PDAM
  - 3) Ketersediaan jaringan listrik
  - 4) Ketersediaan pusat pusat perdagangan ( pasar Tradisional )
  - 5) Ketersediaan fasilitas pendidikan
  - 6) Ketersediaan sarana ibadah
  - 7) Ketersediaan fasilitas kesehatan



- c. Pemekaran daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Islam (Studi pada Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

### **I. Kerangka Berfikir**

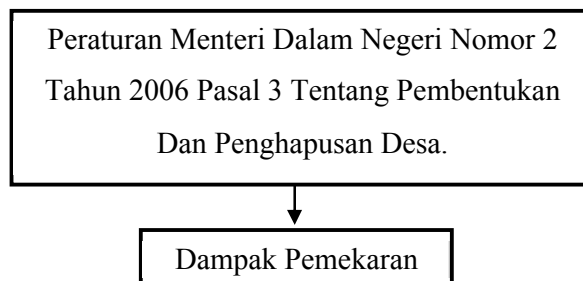
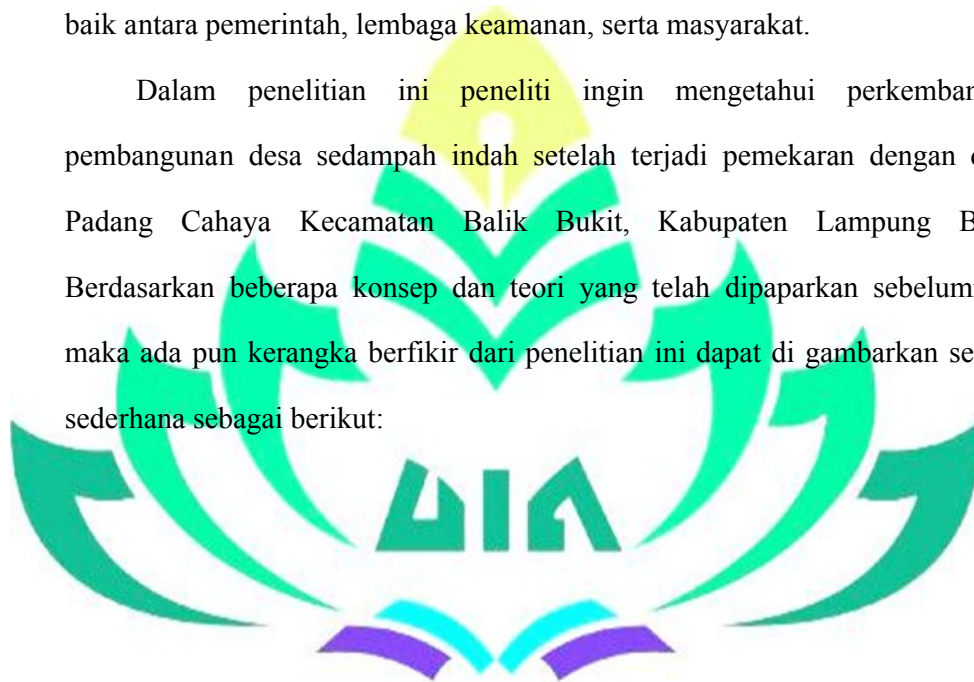
Desa Sedampah Indah memiliki potensi yang dapat dikembangkan seperti potensi di bidang pertanian, kehutanan, dan peternakan. Hal ini yang menjadikan faktor pendorong untuk terbentuknya Sedampah Indah sebagai desa baru di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

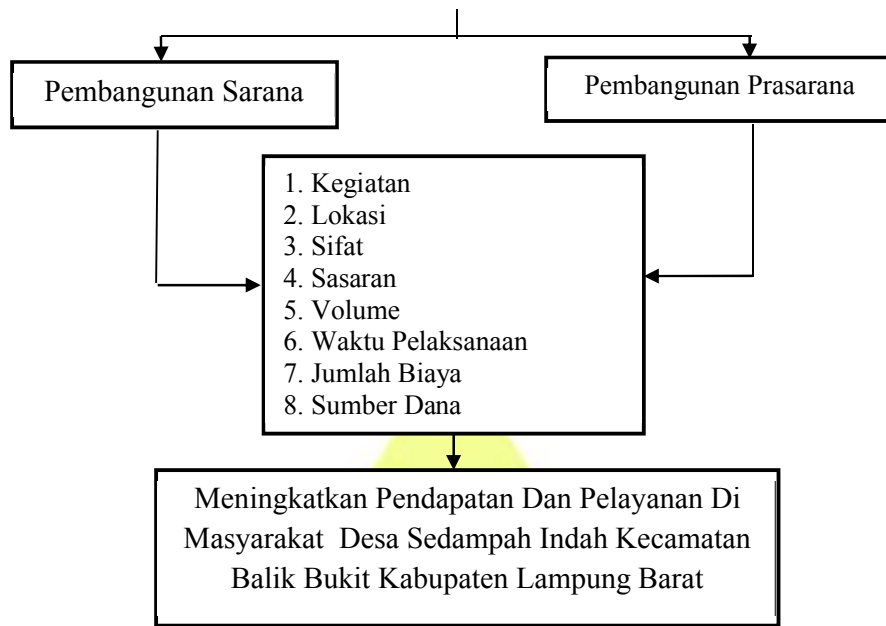
Setelah pemekaran wilayah dapat di realisasikan, maka potensi yang ada di desa Sedampah Indah dapat di kembangkan dan di kelola secara bersama-sama antara pemerintahan dengan masyarakat. Potensi yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakatnya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat desa Sedampah Indah.

Dengan adanya pemekaran wilayah juga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pengurusan identitas penduduk dan meningkatkan pembangunan infrastruktur mengingat infrastruktur adalah bagian terpenting kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa Sedampah Indah.

Pemekaran wilayah juga seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat memiliki kesempatan kerja dan secara langsung pendapatan masyarakat juga akan bertambah. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban tersebut dihasilkan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga keamanan, serta masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui perkembangan pembangunan desa sedampah indah setelah terjadi pemekaran dengan desa Padang Cahaya Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada pun kerangka berfikir dari penelitian ini dapat di gambarkan secara sederhana sebagai berikut:





Gambar 1  
Kerangka Berfikir Penelitian



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Desa

###### a. Pengertian desa

Di Indonesia seperti yang kita ketahui banyak sekali daerah yang di namakan desa, Dalam bahasa sansekerta desa berasal dari dhesi yang berarti “tanah kelahiran” dalam pengertian ini desa merupakan suatu pemukiman yang terdapat kehidupan masyarakat yang identik dikenal dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya.<sup>26</sup> Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Data menunjukan bahwa jumlah desa selalu bertambah dari tahun ketahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan Unit-unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan alasan tersebut jumlah desa di perkirakan masih akan terus bertambah yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya. Memang dalam desa tidak ada standarisasi yang baku, sebab desa yang sangat beranekaragam mulai dari tingkat kepadatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, topografi.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, otonomi desa, h. 7



### **b. Desa menurut para ahli**

Para ahli kependudukan memiliki pendapat masing-masing mengenai desa menurut R. Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut P.J. Bournen, desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama di suatu daerah sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, namun di desa kebanyakan masyarakatnya hidup dengan mata pencaharian dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. di desa kerukunan penduduk lebih terasa dari pada di kota sifat tolong menolong di desa masih terjalin dan saling mengenal seluruh masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Menurut Kuntjaningrat ia mendefinisikan desa sebagai sekumpulan masyarakat kecil yang tinggal menetap di suatu daerah yang jauh dari perkotaan, sedangkan dalam pendapat Bargel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. sedangkan Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek, yaitu:

- a) Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500.
- b) analisis sosial sikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal di antara sesama warganya.

- c) Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

**c. Landasan hukum desa**

Di Indonesia desa sangat mudah sekali bertambah dengan adanya pemekaran desa sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi desa yang mandiri dengan berbagai alasan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang desa,<sup>27</sup> yang mana disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**d. Jenis-jenis desa**

Desa-desanya di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja, di samping desa pertanian juga terdapat jenis-jenis desa lainnya. Walaupun sudah mempunyai rentang waktu yang lumayan dalam sampai saat ini namun mungkin masih relevan untuk digunakan sebagai landasan klasifikasi desa, misalnya menyebutkan beberapa jenis desa yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- a) Desa tambangan (kegiatan penyebrangan orang atau barang, biasanya terdapat sungai-sungai besar).
- b) Desa nelayan (mata pencaharian warganya dengan usaha perikanan laut).

---

<sup>27</sup>T.fakhril dani, edi suhaimi, t. Angga maulana “ analisis implementasi lokasi dana desa pada kota lhokseumawe tahun 2015” *jurnal ekonomi dan kebijakan publik* ,h. 50-51.

- c) Desa pelabuhan (hubungan dengan manca negara, antar pulau, pertahanan/strategi perang dsb).
- d) Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasanya terhadap raja).
- e) Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya.
- f) Desa-desa perintis (yang terjadi karena kegiatannya transmigrasi).

#### e. Karakteristik Desa

Desa tentu memiliki perbedaan. Perbedaan desa di Indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing. Dimana Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum juga dalam realitasnya ada perbedaan-perbedaan (karakteristik) yang meliputinya, sehingga dalam karakteristik yang berbeda tersebut munculah konsep desa secara khusus (desa-desa di Indonesia). Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala desa setempat sebagai perwujudan sistem demokrasi Indonesia, berbeda dengan kelurahan yang di pilih atau ditentukan oleh ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten dan kota-kota lainnya.

Karakteristik pedesaan dalam beberapa teori dibedakan antara masyarakat yang ada di kota dan yang ada di desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya. masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terdapat peranan kelompok primer sangat besar.

2. Keadaan geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
3. Hubungan lebih bersifat homogen.
4. Struktur masyarakat bersifat homogen.
5. Tingkat mobilitas sosial rendah.
6. Keluarga lebih di tekan kan pada fungsi sebagai unit ekonomi.
7. Proporsi jumlah anak cukup besar.<sup>28</sup>

Faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata pencaharian, ukuran komoditas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang di tekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.<sup>29</sup>

Keadaan masyarakat yang ada di desa dari segi psikologis tidak mudah untuk menerima masyarakat luar dan lebih cenderung berhati-hati kepada masyarakat luar. Namun meski demikian masyarakat yang ada di desa bisa juga bersifat hemat, cermat dan menghormati orang lain, tentu saja sangat berbeda dengan masyarakat kota yang cenderung hidup sendiri-sendiri.

## **2. Pemekaran desa**

### **a. Pengertian pemekaran desa**

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang luas sehingga pemerintah pusat sulit untuk menjangkau daerah daerah yang ada di Indonesia terutama daerah yang terpencil untuk pemerataan

---

<sup>28</sup>Nurman, *strategi pembangunan daerah*, (jakarta: PT raja grafindo persada, 2015)., h. 228.

<sup>29</sup>*Ibid*, *strategi...*, h. 228.



pembangunan di Indonesia dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah pemekaran, seperti pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten, pemekaran kecamatan, dan pemekaran desa. Pemekaran desa merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah, istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar, berarti Berkembang menjadi terbuka, Menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, Mulai timbul dan berkembang.<sup>30</sup> pemekaran desa bukan hanya pemisahan dari satu desa menjadi dua atau lebih desa namun pemekaran dapat berupa penggabungan dari dua desa atau lebih menjadi satu desa. akan tetapi di Indonesia lebih banyak terjadi pemecahan satu desa menjadi dua atau lebih daripada penggabungan desa.

#### **b. Landasan hukum pemekaran desa**

Di Indonesia sering sekali terjadi pemekaran desa dengan berbagai alasan yang didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 pasal 3 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan.<sup>31</sup> Dalam peraturan tersebut syarat pembentukan desa adalah jumlah penduduk 200 kk atau seribu jiwa dengan luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat, wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan,

<sup>30</sup> Purwardarminto, *besar bahasa indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 2006)., h. 132.

<sup>31</sup> peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 pasal 3 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan.

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat, potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

PP No. 129 tahun 2000 di uraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena, pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, meningkatkan keamanan dan ketertiban.<sup>32</sup>

### c. Tujuan Pemekaran Desa

Setiap daerah pada saat melakukan pemekaran tentu memiliki tujuan yang telah di rencanakan untuk meningkat kesejahteraan masyarakatnya ,Tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak di tuangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang undang maupun Peraturan Pemerintah. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa di katakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

---

<sup>32</sup> PP No. 129 tahun 2000, tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah,
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban<sup>33</sup>

Pemekaran daerah juga dapat meningkatkan status kekuasaan, pemekaran daerah juga dapat memperbesar peluang menjadi PNS, dengan adanya otonomi daerah, memungkinkan sebagian orang menikmati kas daerah, selain itu juga pemekaran daerah dapat menggali setiap potensi kebudayaan atau sumber daya alam dari setiap daerah atau provinsi masing – masing.

Rumusan regulasi kedepan bukan saja kebijakan tentang pemekaran daerah, tetapi juga perlu memberikan porsi yang sama besar terhadap penggabungan daerah otonom. Baik pemekaran maupun penggabungan daerah otonom di dasarkan pada argumen yang sama. Rumusan tujuan kebijakan penataan daerah bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga untuk pemenuhan kepentingan nasional. Selanjutnya dikatakan rumusan tujuan kebijakan penataan daerah adalah sejauh mana kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah:

- a. Mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah dan di tingkat nasional
- b. Mendukung peningkatan pelayanan publik ditingkat daerah dan nasional

---

<sup>33</sup>Sabarno, *Memendu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2007), h. 76.

- c. Mengakselerasi pembangunan ekonomi, baik ekonomi daerah maupun ekonomi nasional dengan cara yang seefisien mungkin.
- d. Meningkatkan stabilitas politik, baik dalam rangka meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintahan nasional, maupun dalam rangka pengelolaan stabilitas politik dan integrasi nasional.<sup>34</sup>

Dalam otonomi jika pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparatus pemerintahan yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya adalah pemekaran pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemandirian yang bersama.<sup>35</sup>

Di samping itu pemekaran wilayah juga harus mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan harus didasarkan pada:

- a. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah harus selaras dan sesuai, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dengan konsep lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah instansi yang terjamin.
- b. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah bertolak dari pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletakkan pada pemerintahan yang baru.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 77.

<sup>35</sup> Rasyd Pambudi, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Off Set, 2003), h.61.



- c. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung kualitas pelayanan publik.<sup>36</sup>

Pembangunan daerah juga dipandang sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola sumber daya dan peluang yang ada sehingga membentuk pola kemitraan diantara keduanya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.<sup>37</sup> Hal ini disebabkan karena faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah penduduk. Penduduk sebagai sumber daya yang menyediakan modal manusia dalam kegiatan perekonomian.

Selain itu juga, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Semakin banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah.

<sup>36</sup>Winarno,F.G danKoswara, *Telur: komposisi, penanganan dan pengolahan*, (Jakarta: Embrio press, 2002), h.25.

<sup>37</sup>Edy Suandi Hamid.*Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi* (Yogyakarta :UII Press, 2006), h. 160.

Selanjutnya pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang.<sup>38</sup>

Lebih lanjut di katakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua daerah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah.

Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Setelah hampir seperempat abad kebijakan otonomi daerah di indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dibelenggu oleh sistem sentralisasi.<sup>39</sup>

Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Cahyani, et. Al. *Menulis proposl penelitin edisi* (bandung: C.V.Bintang warli Artika, 2006).

<sup>39</sup>UU Nomor 32 tahun 2004

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>40</sup>

Adanya otonomi daerah atau desentralisasi membuat manajemen daerah bisa berkembang lebih baik, partisipasi masyarakatkan lebih tinggi karena dekat dengan kekuasaan dan dengan adanya kontrol dan pengawasan bisa membatasi ruang gerak apa yang di sebut dengan korupsi dan antek-anteknya.

### 3. Pembangunan Infrastruktur

#### a. Pengertian infrastruktur

Seperti yang kita ketahui infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas karena Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Dapat di lihat pengertian yang lebih luas mengenai infrastruktur menurut *The Routledge Dictionary of Ecomics* (1995) yaitu bahwa

---

<sup>40</sup> Undang-undang no.32 tahun 2004

infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.<sup>41</sup> Dapat diketahui juga bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan system Larimer (1994).<sup>42</sup> Infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi Kebijakan pembangunan wilayah perdesaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah kepada tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi.<sup>43</sup>

Dalam hal ini termasuk pula penciptaan kondisi yang menjamin keberlangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro secara sistematis, dan pelestarian lingkungan hidup.

---

<sup>41</sup>Suriani, Cut Nanda Kesuma, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2015, h. 4.

<sup>42</sup>*Ibid.*,

<sup>43</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 19.



2. Kebijakan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Dalam hal ini pengembangan ekonomi rakyat paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah lembaga ekonomi (misalnya melalui kelompok tani). Harus dilakukan terhadap:

- a. Akses terhadap sumberdaya
- b. Akses terhadap teknologi (menggunakan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien)
- c. Akses terhadap pasar, dimana produk yang dihasilkan dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi.

3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Kebijakan ini misalnya: Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang memberikan bantuan uang kepada orang miskin, peraturan yang melindungi terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberi pelayanan kepada penduduk miskin.<sup>44</sup>

Dalam dasar pembangunan desa ada dua istilah pembangunan, yang pertama pembangunan desa dan yang kedua pembangunan masyarakat desa. Terkadang kita sering sekali menemukan pengertian pembangunan desa dengan pembangunan masyarakat desa dicampur aduk, padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa

---

<sup>44</sup>*Ibid*, pembangunan..., h. 20.

(*communnity development*) adalah fokus pembangunannya hanya terarah pada pembangunan kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengarah pada pembangunan masyarakatnya beserta lingkungannya.<sup>45</sup>

Djiwadono menyebutkan secara rinci bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a) Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk.
- c) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secaramaksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.<sup>46</sup>

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa usaha untuk mencapai tujuan sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya modal. Desa tidak akan tercapai pembangunannya jika tidak disertai dengan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan infrastruktur yang mendukung. Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid*,strategi..., h. 240

<sup>46</sup> *Ibid*, strategi..., h. 242

mutlak. Karena hakikatnya dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

**b. Infrastruktur menurut ahli**

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirschman (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di butuhkan.<sup>47</sup> Itu artinya tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi. Perbedaan antara infrastruktur dasar dan lainnya tidaklah selalu sama dan dapat berubah menurut waktu. Misalnya telepon yang dulunya digolongkan kedalam infrastruktur pelengkap, sekarang digolongkan sebagai infrastruktur dasar.

**c. Landasan hukum pembangunan infrastruktur**

Mengingat infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan dan melancarkan urusan perekonomian maka disetiap daerah membutuhkan infrastruktur yang memadai, Infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediannya diprioritaskan. Yang mana sesuai dengan pembangunan infrastuktur yang di dasarkan pada UU Nomor 75 tahun 2014 pasal 1 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.<sup>48</sup>

Penyediaan infrastruktur prioritas merupakan pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur yang

<sup>47</sup>*Ibid*, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur...h, 3.

<sup>48</sup>UU Nomor 75 tahun 2014 pasal 1 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

dibutuhkan atau diprioritaskan di suatu daerah, termasuk di desa. Dapat berupa pengelolaan infrastruktur yang tersedia atau pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan layanan infrastruktur prioritas. Dalam pembangunan infrastruktur merupakan pendanaan kerja sama antar pemerintahan dan swasta.

#### d. Karakteristik infrastruktur

Dalam infrastruktur tentu memiliki karakteristik yang disebabkan oleh tingginya biaya tetap serta tingkat kepentingannya dalam perekonomian. Karakteristik infrastruktur adalah eksternalitas, baik positif maupun negatif dan adanya monopoli alamiah (*natural monopoly*). Selain itu, infrastruktur juga bersifat *non eksklusif* (tidak ada orang yang dapat dikesampingkan), *non rivalry* (konsumsi seorang individu tidak mengurangi konsumsi individu yang lainnya) serta umumnya biaya marginal adalah nol. Infrastruktur juga umumnya tidak diperjual belikan (*non tradable*).<sup>49</sup>

### 4. Kesejahteraan

#### a. Pengertian kesejahteraan

Dapat diketahui setiap individu tentu menginginkan kesejahteraan, kesejahteraan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, sejahtera juga dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan

<sup>49</sup>*Ibid*, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur...h, 4.



yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>50</sup>

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah masyarakat hidup berkecukupan terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>51</sup> Kesejahteraan, yang berarti masyarakat memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material (makanan-minuman, pakaian, perumahan, dan sebagainya) dan kebutuhan spiritual (pendidikan, agama, ilmu, keamanan, kepercayaan kepada diri) dengan layak.<sup>52</sup>

#### **b. Kesejahteraan menurut para ahli**

Mengingat kesejahteraan merupakan keinginan dari setiap individu maka para ahli memiliki pendapat tentang kesejahteraan, Dalam penelitian yang dilakukan Jones dan Klenow, tingkat kesejahteraan diukur dengan data konsumsi, waktu luang, perbedaan standar hidup, dan tingkat kematian.<sup>53</sup> Sedangkan Sugiharto, dalam penelitiannya

<sup>50</sup> *Ibid*, konsep kesejahteraan...,h. 4.

<sup>51</sup> Amirus Sodiq, "konsep kesejahteraan dalam islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 384.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>53</sup> Jones, Charles I. dan Peter J. Klenow. *Beyond GDP? Welfare across countries and Time*, LAEF growth and development conference, (Chicago:20110), h. 386.

menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>54</sup>

Kakisina juga menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, diartikan bahwa faktor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan, jumlah beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, dan pendapatan PNS. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industri, pendapatan dagang, pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta.<sup>55</sup>

### c. Landasan hukum kesejahteraan

Tentu setiap orang menginginkan kesejahteraan mengingat kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

<sup>54</sup>Sugiharto Eko. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", *jurnal EPP*. Vol. 4. No. 2. 2007: 32-36, 2007, h. 33.

<sup>55</sup>Kakisina, Leonard O. 2011. "Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011. H. 65.

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.<sup>56</sup> Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### **d. Indikator kesejahteraan**

Keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang (monetary-based indicators).<sup>57</sup>

Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang, karena itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subyektif. Kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang digunakan untuk melengkapi indikator obyektif.

<sup>56</sup> UU No. 11 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>57</sup> *Ibid*, konsep kesejahteraan..., h. 385

Berbagai penelitian tentang indeks kebahagiaan mengaitkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subyektif dengan komponen kepuasan hidup dan emosi positif. Dalam konteks pemanfaatan indeks kebahagiaan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan publik, maka komponen kebahagiaan yang digunakan adalah kepuasan hidup.

Pengembangan indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan representasi estimasi tingkat nasional.<sup>58</sup> Pada tahun 2017, BPS kembali melaksanakan pengukuran tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017 dengan cakupan sampel yang dapat digunakan untuk estimasi tingkat nasional maupun provinsi.

Beberapa temuan menarik yang dihasilkan dari indeks kebahagiaan Nusa Tenggara Barat berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi, yaitu:<sup>59</sup>

1. Indeks kebahagiaan penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dipedesaan.
2. Penduduk berstatus menikah mempunyai indeks kebahagiaan paling tinggi, mereka yang berstatus cerai lebih rendah indeks

<sup>58</sup>Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, agustus 2019

<sup>59</sup>*Ibid*, konsep kesejahteraan...,h. 385



kebahagiaannya, yaitu cerai hidup lebih rendah indeks kebahagiaannya daripada cerai mati.

3. Penduduk umur di bawah 24 tahun memiliki indeks kebahagiaan tertinggi, sementara, penduduk lansia (kelompok umur 65+) mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah.
4. Ada kecenderungan dengan makin banyak anggota rumah tangga, maka indeks kebahagiaan cenderung semakin tinggi. Namun ketika jumlah anggota rumah tangga meningkat menjadi 7 atau lebih, maka indeks kebahagiaan cenderung menurun.
5. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula indeks kebahagiaan. Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah, sementara indeks kebahagiaan tertinggi pada penduduk dengan tingkat pendidikan S2 atau S3.
6. Semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula indeks kebahagiaannya. Pada tingkat pendapatan lebih dari 7,2 juta rupiah perbulan, indeks kebahagiaannya mencapai 80,05, sementara pada tingkat pendapatan 1,8 juta rupiah ke bawah maka indeks kebahagiaannya hanya 66,47.

Dari data di atas Pemikiran konvensional tentang kesejahteraan lebih banyak bertujuan pada terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam hal materi, kesejahteraan spiritual agaknya mendapatkan porsi perhatian yang lebih sedikit daripada kesejahteraan yang bersifat spiritual, hal ini bisa dilihat dari penjelasan Badan Pusat Statistik (2000) yang

menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga diantaranya adalah tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

## 5. Kesejahteraan dalam perspektif islam

### a. Kesejahteraan dalam perspektif alquraan dan hadist

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9:

وَلُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضَعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا الَّذِينَ وَلِيَّ خَشَ  
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَّةَ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

*oleh sebabtu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.<sup>60</sup>

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)*”<sup>61</sup>

Dalam kosep ekonomi Islam, uang adalah barang public, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam .

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Deponegoro, 2005) Q.S : an nisa Ayat (9), h. 483.

<sup>61</sup> Yusuf, Qardhawi. *Al Iman Wa al Hayah*, Beirut, MuassasahRisalah.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduksi modalnya, Islam memberikan alternative dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan qard (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

#### **b. Kesejahteraan menurut para ahli**

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayahal-thayyibah). Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan.<sup>62</sup> Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat

---

<sup>62</sup>Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, h. 39.



akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator Konsep Kesejahteraan dalam Islam. Kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.<sup>63</sup>

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep-konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral,

---

<sup>63</sup> Abu Hamid, Al-Ghazali. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam Madinah, h. 390.

spiritual dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam<sup>64</sup>.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

1. Agama (*al-dien*);
2. Hidup atau jiwa (*nafs*);
3. Keluarga dan keturunan (*nasl*);
4. Harta atau kekayaan (*maal*); dan
5. Intelekt atau akal (*aql*).

Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu kebaikan duniaini dan akhirat (*maslahat al-din wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>65</sup> Islam dirancang sebagai suatu berkat untuk kesejahteraan umat manusia mengarahkan hidup yang lebih baik kaya, menghargai kehidupan dan bukan lebih miskin, penuh dengan kesukaran atau penderitaan. Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat yaitu :

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي  
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ

<sup>64</sup> Zainuddin Sardar, "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam". *Sardar et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No.5, 5 Mei 2016, h. 395

<sup>65</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.

يَكُونُ حُطَمًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ  
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah Swt. Karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2, yang berbunyi :

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

Artinya : “Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Deponegoro, 2005) Q.S : al hadid Ayat (20), h. 483.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Khan menjelaskan bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat.<sup>67</sup>

### c. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

---

<sup>67</sup> Amirus Sodiq. “Konsep Kesejahteraan Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember, h. 395.

Ekonomi adalah kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan hidupnya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus didapat dan bila tidak terpenuhi mengganggu fisik dan psikis manusia. Sedangkan keinginan sesuatu yang di dapat dan bila tidak terpenuhi maka akan terganggu psikisnya saja.<sup>68</sup>

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh Al-Syathibi yaitu.<sup>69</sup>

a. *Al-Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dalam buku fiqih, termasuk As-syathibi, membagi menjadi lima hal yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama,

<sup>68</sup> Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikir Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12.

<sup>69</sup> Muslimin Kara, "Pemikiran As-Syathibi Tentang Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". Vol. 2 No. 2, 2015.



keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang dan keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Kelima *al-dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyeruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaanya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *al-dharuriyyat*. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsure pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

b. *Al-Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak tercapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya

dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

c. *Al-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier/Pelengkap)

Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkat kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

## B. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh ketut wahyu dhyatmika yang berjudul “analisis ketimpangan pembangunan provinsi banten pasca pemekaran wilayah” ,dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di provinsi banten.

Penelitian yang dilakukan oleh lestiawati dengan judul “Analisis Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Daerah Pasca Pemekaran Desa Di Kabupaten Pesisir Barat” . dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis pemerintahan dalam mengevaluasi pembangunan di daerah pemekaran, termasuk didalamnya pengawasan terhadap pembangunan ditingkat Pekon/Desa. Dengan baiknya kondisi pemerintahan pekon Kabupaten Pesisir

Barat akan lebih mendapatkan perhatian lebih hal tersebut sangat memberikan pengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosfa Nur Azizah pada tahun 2017 yang berjudul “Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Candimas Kabupaten Lampung Utara)”. Dalam deskripsi tersebut penulis membahas mengenai strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan masyarakat didalamnya, dan menganalisis alokasi dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Titis Istikomah pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)”. Dalam deskripsi tersebut penulis menganalisis tentang program pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008 – 2010 ditinjau dari persepsi anggota KSM terhadap program serta perbedaan pendapatan usaha, tabungan, dan investasi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tempat, waktu dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran pada perkembangan pembangunan infrastruktur dan dampak perkembangan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Wawancara Guru Honor SD Sekaligus Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 21 juni 2019.
- Abu Hamid ,Al-Ghazali. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, jurnal Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah.
- Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Angga maulana, T.fakhrial dani, edi suhaimi, t. “ Analisis Implementasi Lokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015” *jurnal ekonomi dan kebijakan public*.
- Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, Agustus 2019.
- Bakoroni, Wawancara Kepada Kaur Pembangunan, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 21 juni 2019.
- Cahyani, et. Al. *Menulis proposl penelitin edisi* (bandung: C.V.Bintang warli Artika, 2006).
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Cut Nanda Kesuma ,Suriani, , Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan* ,Volume 4 Nomor 1, Mei 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Deponegoro, 2005.
- Dodi, Wawancara Kepada Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 21 juni 2019.
- Edi, Wawancara Kepada Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 21 juni 2019.
- Eva, Wawancara Kepada Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 21 juni 2019.
- Gunawan, Totok , *Fakta dan Konsep Geografi*. Jakarta: Inter Plus, 2007.
- Hamid Edy Suandi. *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi* Yoyakarta : UII Press, 2006.

H. A. Tabrani Rusyan. *Membangun efektivitas kinerja kepala desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Haw. Widjaja, *otonomi desa*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014.

Kakisina, Leonard O. 2011. "Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi, (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011.

Koesoemahatmadja, R.D.H. *Peranan Administrasi dalam Pembangunan*. Jakarta: Eresco 1979.

Koswara dan Winarno, F.G, *Telur: komposisi, penanganan dan pengolahan*, Jakarta: Embrio press, 2002.

Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP), *Dokumen rencana pembangunan jangka menengah pekon (RPJM-PEKON) tahun 2016-2021 pekon sedampih indah kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat*.

Muhammad Jid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri. *Sosiologi pedesaan* Jakarta: pt. Rajagrafindo persada, 2016.

Nurman, *strategi pembangunan daerah*, Jakarta: PT raja grafindo persada, 2015.

Pambudi Rasyd, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Off Set, 2003.

Peraturan menteri dalam negeri, Nomor 27 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pembuatan peta garis batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 pasal 3 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan.

Peter J. Klenow dan Jones, Charles I. *Beyond GDP? Welfare across countries and Time*, LAEF growth and development conference, Chicago: 2010.

Posumah Ferdy, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15, No 2, 2015.

Purwardarminto, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 2006.



PP No. 129 tahun 2000, tentang pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sabarno, *Memendu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Gravika, 2007.

Santana, Septiyawan. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Santer Nicko, Implementasi Program Gerdema Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 3, No.3, 2015.

Septi, Wawancara Kepada Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 21 juni 2019.

Siti, Wawancara Kepada Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 22 juni 2019

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, Bandung : Alfabeta, 2017.

Suharsimi Rikunto, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta : Bina Aksara, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002.

Sodiq Amirus, “konsep kesejahteraan dalam islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Sugiharto Eko. “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik”, *jurnal EPP. Vol.4.No.2.2007:32-36,2007*.

Suratal, Wawancara Kepada Peratin, Desa Sedampah Indah kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat, 21 April 2019.

Undang- undang Nomor. 11 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesi Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3).

UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas desa.

UU Nomor 28 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa batas wilayah desa dapat dinyatakan dalam bentuk peta desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78.

Wahyono, Wawancara Kepada Masyarakat, Desa Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, 22 juni 2019.

Yosephus Silvana, Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga), *Jurnal Politico* , Vol 3, No 1, 2014.

Yukowati Ike, Evaluasi Pemekaran Wilayah Malausma Sebagai Kecamatan Baru Di Kabupaten Majalengka. *Skripsi*. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi. FPIPS. Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.

Yusuf, Qardhawi. *Al Iman Wa al Hayah*, Beirut, Muassasah Risalah.



**Lampiran I**  
**Pedoman Wawancara Penelitian**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara I.**

1. Kapan pemekaran desa sedampah indah mulai di rencanakan dan di ajukan ke pemerintahan pusat?
2. Mengapa desa sedampah indah menginginkan pemekaran desa?
3. Apakah pemekaran desa merupakan permintaan pemerintah atau ajuan dari masyarakat desa sedampah indah?
4. Apa faktor pendorong dan penghambat pemekaran desa sedampah indah?
5. Berapalama pengajuan pemekaran desa baru terealisasi?
6. Apakah pemekaran desa sedampah indah telah memenuhi syarat pemekaran dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006?
7. Berapa jumlah kk desa sedampah indah saat pengajuan pemekaran?
8. Bagaimana dampak pemekaran desa dalam perkembangan pembangunan infrastruktur?
9. Apa saja pembangunan infrastruktur yang telah tercapai setelah pemekaran.?

## **Wawancara II.**

1. apakah perubahan yang ibu/bapak rasakan setelah pemekaran..?
2. bagaimana keadaan infrastruktur setelah pemekaran?
3. apakah ibu/bapak merasakan manfaat infrastruktur yang telah ada?
4. Apa mata pencaharian penduduk desa sedampah indah
5. Apasajakah sarana dan prasarana yang telah di bangun setelah pemekaran
6. apakah keberadaan infrastruktur seperti jalan dapat meningkatkan perekonomian bapak/ibu?
7. Apakah pemekaran desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat sedampah indah?

## Lampiran II

### Dokumentasi



Dokumentasi : keadaan tanah desa sedapah indah kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat.



Dokumentasi : masjid di desa sedapah indah





Dokumentasi: gapura dusun wonorejo, dan jalan desa sedampah indah



Dokumentasi : jaringan listrik desa sedampah indah



Dokumentasi : masjid di desa sedampah indah dalam proses pembangunan



Dokumentasi : tugu desa sedampah indah





Dokumentasi : SD negeri sedampah indah



Dokumentasi : wawancara dengan masyarakat desa sedampah indah



Dokumentasi : PAUD desa sedampah indah





Dokumentasi : Jalan di dusun wonorejo desa sedampah indah



Dokumentasi : Jalan di dusun sebaris desa sedampah indah



Dokumentasi : musholla desa sedampah indah



Dokumentasi : masjid di desa sedampah indah